

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Karanganyar agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi

pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jenawi memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
19. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 No.6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No.129);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jenawi Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Jenawi pada Tahun 2023.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jenawi, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu,

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jenawi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan realisasi APBD Kecamatan Jenawi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2018– 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Kecamatan Jenawi untuk Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.090.320.000,- (*dua milyar Sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.671.120.000,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp.2.035.255.222,- (*dua milyar tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) , sisa anggaran Rp. 55.064.778,- (*lima puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Jenawi s/d Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jenawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	97,50						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat		100						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pajak listrik,air,telpon dan wifi kantor		87,67						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor kebersihan kantor		100						
	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor		100						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan		100						

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik kantor		100						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran/surat kabar		100						
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat		100						
	Penyediaan bahan logistic Rumah Dinas	Tersedianya bahan makanan dan alat kebersihan kantor		100						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rapat rapat koordinasi kantor		91,31						
	Kompensasi tanah kas	Terbayarnya kompensasi tanah kas desa untuk relokasi bencana alam		100						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	97.87						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor		85,33						
	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Peralatan gedung kantor		100						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas		96,60						

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		100						
	Pemeliharaan rutin berkala/mebelair	Terpeliharanya mebelair		100						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100	100						
	Penyusunan RKA/DPA	Penyusunan RKA		100						
	Penyusunan Renstra	Penyusunan Renstra		100						
	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Cakupan pengembnagan dan pemnagunan wilayah		100						
	Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Kader Siaga Trantib		100						
	Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	FKUB, MTQ, Kemah Kebangsaan		100						
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Musrenbangcam, dan Kegiatan PKK Kecamatan		100						
	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	Pembinaan Adm Pemerintahan Desa dan Pembinaan Perangkat Desa		100						
	Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang									
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sakip	70	69,62	67	72,57	108,3	69	43,28	61,83

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip	100		100	98,47		100	34,91	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sakip			100	99,84		100	13,33	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Sakip			100	97,88		0	0	
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip						100	40,62	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sakip	100		100	97,03		100	45,90	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Sakip			100	97,03		100	45,90	
7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Sakip	100		100	96				
7-01.0-00.0-.09.01.2.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Sakip			100	96				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sakip	100		100	99,47		100	40,18	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Sakip			100	100		100	62,89	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Sakip			100	98		100	37,35	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Sakip			100	100		100	48,98	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sakip			100	100		100	33,33	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sakip			100	100		100	39,13	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sakip	100		100	99,93		100	0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sakip			100	99,93				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Sakip			100	100				
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sakip	100		100	98,46		100	30,27	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Sakip			100	100		100	40	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik	Sakip			100	90,75		100	33,24	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Sakip			100	100		100	30,02	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sakip	100		100	95,96		100	46,96	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Sakip			100	93,77		100	50	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sakip			100	100		100	24,36	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Sakip			100	100				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	75	85,03	72	85,106	118,2	74	7,24	9,6

	PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	75		72	85,106		100	7,24	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat			100	100		100	0	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat			100	100		100	14,37	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MAASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif	85	85	85	85	100	85	64,72	76,14
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100		100	100		100	42,37	
7.01.03.2.01.01	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif			100	100		100	42,37	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100		100	100		100	100	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif			100	100		100	100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	85	85	85	100	85	28,76	33,84

7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100		100	100		100	0	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif			100	100		100	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100		100	100		100	30,59	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif			100	100		100	30,59	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKP Des yang sesuai ketentuan	85	85	85	85	100	85	17,27	20,32
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKP Des yang sesuai ketentuan	100		100	100		100	17,27	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKP Des yang sesuai ketentuan			100	100		100	50,45	
7.01.05.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Desa Memiliki APBdes dan			100	100		100	0	

		RKP Des yang sesuai ketentuan								
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional	Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKP Des yang sesuai ketentuan			100	100		100	35,96	
7.01.06	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda	85	85	85	85	100	85	28,49	33,52
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda	100		100	100		100	28,49	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda			100	100		100	32,49	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda			100	100		100	23,94	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jenawi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenawi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pelayanan Umum di tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jenawi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa

- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya paham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jenawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja Kecamatan Jenawi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			67	69	70		72,57		70		
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			72	74	75		85,106		75		

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

Tahun 2023 merupakan tahun politik dimana masa jabatan Bupati Karanganyar akan berakhir pada periode Tahun 2023. Dan selanjutnya akan diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan pada periode berikutnya.

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antarlain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).
6. Tersusunya Renstra Perubahan RPJMD di tahun 2021 karena ada perubahan Nomenklatur yang baru ke dalam Permendagri 90.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jenawi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jenawi, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jenawiyang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jenawi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	<p>a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.</p> <p>b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur.</p> <p>d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;</p> <p>e. masih lemahnya koordinasi dalam</p>	<p>a. Seksi Tata Pemerintahan</p> <p>b. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>c. masih rendahnya disiplin aparatur desa;</p> <p>d. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan;</p> <p>e. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan;</p> <p>b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>a. belum optimalnya sosialisasi Perda;</p> <p>b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;</p> <p>c. belum optimalnya pembinaan Linmas</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p>f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan.</p> <p>g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan</p> <p>h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;</p> <p>i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan</p>	<p>desa;</p> <p>d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);</p> <p>e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.</p> <p>c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;</p> <p>b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;</p> <p>c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;</p> <p>d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>(RAB) kegiatan pembangunan.</p> <p>d.Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. <p>e.Seksi Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana. c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan,; d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

1. Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Jenawi

Kedudukan Kantor Kecamatan Jenawi yang berada di perbatasan kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2. Kurangnya dukungan fasilitas umum

Perlu adanya penambahan fasilitas umum lingkungan Kantor Kecamatan Jenawi berupa mushola, hal ini untuk mengantisipasi apabila ada warga masyarakat yang ingin beribadah pada saat berada di kantor kecamatan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Jenawi menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas pokoknya yaitu : membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan fungsinya yaitu :
 1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing seksi sebagai berikut :

a. Sekretariat :

1. Peningkatan Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Organisasi Kecamatan
2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
3. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4. Peningkatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Peralatan barang inventaris dan perlengkapan

b. Seksi Tata Pemerintahan :

1. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam menangani administrasi pemerintahan Desa dan penyusunan Perdes
2. Memantapkan terbentuknya lembaga Desa dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
3. Memadukan dan mensinkronisasikan tugas yang akan dilaksanakan oleh masing- masing Instansi Pemerintah
4. Peningkatan ketrampilan perangkat Desa
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP dan KK

c. Seksi Pembangunan Masyarakat :

1. Pemantapan perencanaan pembangunan Desa
2. Peningkatan efektifitas penggunaan dana pembangunan desa
3. Peningkatan prakasa serta swadaya masyarakat dalam pembangunan
4. Pengembangan potensi penunjang pariwisata
5. Peningkatan tertib pembagian air dan pemanfaatannya

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani penyakit sosial dilingkungan
2. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam

e. Seksi Kesejahteraan Sosial:

1. Peningkatan kepedulian warga masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya
2. Peningkatan peran serta lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani penyakit sosial

3. Peningkatan mutu gizi makanan bagi keluarga dan sarana kesehatan masyarakat
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan beragama pendidikan dan kebudayaan

f. Seksi Pelayanan Umum :

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang bersih, indah dan serasi
2. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam mencari legalisasi surat keterangan
3. Peningkatan kelancaran pelaksanaan rapat dan upacara serta protokoler

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.kra	Nilai SAKIP	70	2.909.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	2.282.080.000	
	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	17.000.000	perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	12.947.800	
	Administrasi keuangan	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	2.225.000.000	administrasi keuangan	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	1.725.520.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	150.000.000	administrasi umum perangkat daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	61.812.200	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	60.000.000	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	52.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	410.300.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	382.800.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	47.000.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Jenawi	Nilai SAKIP	70	47.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Jenawi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	6.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Jenawi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	6.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	IKM	75	6.000.000	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	IKM	75	6.000.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Jenawi	Prosentase lemabaga Kemasyarakatk Aktif	85	32.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Jenawi	Prosentase lemabaga Kemasyarakatk Aktif	85	20.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Jenawi	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85	14.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jenawi	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85	8.500.000	
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kec. Jenawi	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85	18.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Jenawi	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85	11.500.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	43.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	35.650.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	38.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	33.500.000	
	Koordinasi Pererapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	5.000.000	Koordinasi Pererapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. jenawi	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	85	2.150.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	85	42.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	85	99.700.000	
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Ddaerah	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	85	42.500.000	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Ddaerah	Kec.Jenawi	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	85	99.700.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Jenawi	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	85	65.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Jenawi	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	85	14.650.000	
	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.Jenawi	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	85	65.0000.000	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.jenawi	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	85	14.650.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jenawi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Prioritas tahun 2023 adalah melanjutkan keterlanjutan capaian perencanaan 2022 dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2023 yaitu : **“Penguatan sinergi Pembangunan Desa dan Kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan keterlanjutan.”**

Dengan arah kebijakan:

1. fasilitasi desa mandiri dan berkembang
2. masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif
3. pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak
4. perlindungan, pelestarian, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah
5. pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul
6. pengembangan inovasi dan prestasi daerah
7. pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jenawi

3.1.1 Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Jenawi merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan Tahun 2022 . Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- ***Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.***

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jenawi Tahun 2022 adalah

- ***Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.***

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jenawi
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian		Target akhir Renstra
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	skor	NA	NA	69,62	72,57	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	skor	NA	NA	85,03	85,106	74	75	75

3.2 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai:

- a. Faktor- factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jenawi terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja

pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu

dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola

pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem

pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jenawi mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karanganyar adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jenawi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Tujuan Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p>	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2023 ada 6 Program dan 13 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrai Keuangan
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

- e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama OPD : Kecamatan Jenawi

Kode	Urusan /Bidang Pemerintahan daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
7.01	Kecamatan				2.458.080.000			3.247.705.000	
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	2.282.080.000	Dana Alokasi Umum		3.082.680.000	
7.01.001.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	12.947.800	Dana Alokasi Umum		31.550.000	
7.01.001.2.02	Administrasi keuangan	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	1.725.520.000	Dana Alokasi Umum		2.358.750.000	
7.01.001.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	61.812.200	Dana Alokasi Umum		102.030.000	
7.01.001.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	52.000.000	Dana Alokasi Umum		69.000.000	
7.01.001.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	382.800.000	Dana Alokasi Umum		467.300.000	
7.01.001.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Kec.Jenawi	70	47.000.000	Dana Alokasi Umum		54.050.000	
7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec.Jenawi	75	6.000.000	Dana Alokasi Umum		6.400.000	
7.01.002.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	IKM	Kec.Jenawi	75	6.000.000	Dana Alokasi Umum		6.400.000	

7.01.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga Kemasyarakatan Aktif	Kec.Jenawi	85	20.000.000	Dana Alokasi Umum			32.800.000
7.01.003.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Kec. Jenawi	85	8.500.000	Dana Alokasi Umum			12.100.000
7.01.003.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Kec. Jenawi	85	11.500.000	Dana Alokasi Umum			20.700.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Kec.Jenawi	85	35.650.000	Dana Alokasi Umum			49.450.000
7.01.004.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Kec.Jenawi	85	33.500.000	Dana Alokasi Umum			43.700.000
7.01.004.2.02	Koordinasi Pererapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Kec. jenawi	85	2.150.000	Dana Alokasi Umum			5.750.000
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	Kec.Jenawi	85	99.700.000	Dana Alokasi Umum			45.875.000
7.01.005.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa memiliki APBdesa dan RKPDes sesuai Ketentuan	Kec.Jenawi	85	99.700.000	Dana Alokasi Umum			45.875.000
7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	Kec.Jenawi	85	14.650.000	Dana Alokasi Umum			30.500.000
7.01.006.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase wilayah /Desa tertib Perda	Kec.jenawi	85	14.650.000	Dana Alokasi Umum			30.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jenawi pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jenawi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jenawi

Unit Organisasi : Kecamatan Jenawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN					2.458.080.000					3.247.705.000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.282.080.000					3.082.680.000			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.947.800					31.550.000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sakip	Tersus Renja,RKA, DPA dan Rentra SKPD		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	70	4 dok		5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.750.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip	Tersusunnya laporan keuangan LKjIP,LPT,CALK		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 lap bulanan dan 3 lap		7.947.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13.800.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.725.520.000					2.358.750.000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAKIP	Gaji dan Tunjangan Pegawai	gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100 nilai	15 org/bulan		1.725.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP	100 nilai	2.358.750.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					61.812.200					102.030.000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sakip	jumlah penyediaan komponen listrik dan instalasi kantor		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		2.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.000.000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistic kantor	Sakip	Tersedianya bahan logistic kantor, dan alat kebersihan kantor		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		19.662.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.480.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sakip	Jumlah cetak dan penggandaan		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		6.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				14.550.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sakip	Jumlah bahan bacaan /koran		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sakip	jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas kantor		Kab. Karanganyar Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		29.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32.995.000	
7	01	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD		Tertatanya arsip dinamis				12 bulan		1.500.000					3.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								52.000.000						69.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sakip	Jumlah pengadaan laptop,printer		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan		2 unit		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23.000.000	
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset tetap lainnya	Sakip	Tersedianya kursi rapat dan kursi putar		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan		52 unit		27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				46.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380.220.000						467.300.000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sakip	Tersedianya materai		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan		12 bln		1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.800.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sakip	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya listrik dan Air		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	100	12 bln		27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34.500.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sakip	Jumlah tenaga kebersihan dan jaga malam		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 bln		353.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				430.000.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47.000.000						54.050.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sakip	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan bermotor, pajak dll		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan		5 unit		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34.500.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sakip	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan		12 bln		7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.050.000	

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sakip	Terpeliharanya gedung kantor		Kab. Karanganyar Jenawi, Semua Kelurahan		12 bln		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.500.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								6.000.000					6.400.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								6.000.000					6.400.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	IKM	Indek Kepuasan masyarakat		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	75	12 bln		2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85%	3.100.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	IKM	Jumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	75	12 bln		3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85%	3.300.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								20.000.000					40.700.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								11.500.000					20.700.000
7	01	003	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat PKK		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	12 bln		11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85 %	20.700.000
7	01	03	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								8.500.000					12.100.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah kegiatan musrenbang kel dan musrenbangcam		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	9 desa		8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85 %	12.100.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								35.650.000					49.450.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2.150.000					5.750.000
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang –undangan dana tau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Terlaksananya penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	12 bln		2.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85%	5.750.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								33.500.000					43.700.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Pembinaan linmas dan Pembinaan Wilayah		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	12 bulan		33.500.000				85%	43.700.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								99.700.000					45.875.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								99.700.000					45.875.000

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Persentase Desa memiliki APBdes dan RKP Des sesuai Ketentuan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	9 desa		5.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	9.775.000
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Desa memiliki APBdes dan RKP Des sesuai Ketentuan	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan hari jadi Kab. Karanganyar		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	2 keg		87.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 %	25.750.000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Desa memiliki APBdes dan RKP Des sesuai Ketentuan	Terlaksananya kegiatan Keagamaan		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	12 bln		6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	10.350.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							14.650.000				30.500.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14.650.000				30.500.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase wilayah tertib Perda	Terlaksannya pembinaan administrasi desa		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	9 desa		7.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	15.500.000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan pearngkat Desa	Persentase wilayah tertib Perda	Terlaksanya pembinaan kepala desa dan perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kelurahan	85%	9 desa		7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85%	15.000.000
TOTAL												2.458.080.000				3.247.708.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilingkup Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Kecamatan Jenawi sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

